

BAB II

KEMAJUAN EKONOMI HONG KONG DAN POSISINYA SEBAGAI PUSAT EKONOMI TERPENTING DI TIONGKOK

Di dalam bab ini akan membahas mendalam tentang sejarah Hong Kong yang meliputi dimulainya perang Candu yang terjadi di Tiongkok dan dampaknya terhadap penyerahan Hong Kong kepada Inggris serta proses kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok. Selain itu akan dibahas pula terkait kemajuan perekonomian Hong Kong dan posisinya sebagai pusat ekonomi terpenting di Tiongkok dilihat dari kondisi perekonomian Hong Kong ketika masih menjadi wilayah kolonial Inggris dan Hong Kong di era paska kolonial.

A. Sejarah Hong Kong

Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang banyak dikenal oleh seluruh dunia, tidak hanya dari bagaimana kemajuan yang dimiliki akan tetapi termasuk bagaimana proses perkembangan wilayahnya baik dari sisi politik, sosial dan terutama ekonomi. Sejarah Hong Kong, sebuah pelabuhan bisnis yang terletak di lepas pantai tenggara Eurasia. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak Zaman Batu Tua, dan kemudian dengan penggabungannya ke dalam kerajaan China selama dinasti Qin (221-206 SM). Dimulai sebagai desa nelayan nelayan dan lokasi produksi garam, Hong Kong kemudian berkembang menjadi pelabuhan bebas penting dan akhirnya menjadi pusat keuangan internasional utama (Hong Kong Government, 2016).

Hong Kong sebagai suatu wilayah yang memiliki kebebasan otonomi yang sangat tinggi dan memiliki keistimewaan yang telah diberikan oleh Tiongkok. Kebebasan dan keistimewaan yang diberikan dari Tiongkok kepada Hong Kong ini merujuk kepada perkembangan dan sistem ekonomi Hong Kong yang sudah berjalan sejak Hong Kong menjadi daerah koloni Inggris (Hung, 2015).

1. Ekonomi Hong Kong Pada Masa Kolonial

Sejarah mula yang sangat berdampak terhadap kemajuan ekonomi Hong Kong adalah perang Candu. Perang Candu, Perang Opium berasal dari bahasa Tionghoa yaitu 鴉片战争 atau didalam karakter tradisionalnya yaitu 鴉片戰爭 dan di penulisan pinyinnya yaitu Yāpiàn Zhànzhēng, juga disebut Perang Anglo-Tiongkok.

Perang Candu merupakan dua perang yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 yang berlangsung dari tahun 1839 - 1842 dan 1856 – 1860, perang ini terjadi antara orang Tiongkok dan orang Inggris di kedaulatan Tiongkok. Pada perang tersebut pedagang Eropa menggunakan kekuatan adiktif candu untuk memperoleh hubungan dagang penting dengan Tiongkok, negara yang mengisolasi diri dari dunia luar (William Travis Hanes, 2002).

Nama “Candu” pada perang ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Dinasti Qing dan Inggris mengenai perdagangan Candu di daratan Tiongkok. Konflik bersenjata yang berlangsung dua kali di Tiongkok sekitar pertengahan abad ke-19 antara kekuatan negara-negara barat dan Dinasti Qing (1644-1912) yang memerintah Tiongkok. Meskipun perang opium pertama dimulai pada tahun 1839, "tembakan pertama" dalam konflik terjadi hampir setengah abad sebelumnya, ketika utusan Inggris ke kaisar Qianlong, costom yang diterima oleh setiap negara lain yang melakukan bisnis dengan pasar besar Tiongkok (William Travis Hanes, 2002).

Perang Opium terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860 menandai sebuah tahap baru dalam hubungan China dengan Barat. Kekalahan militer China dalam perang ini memaksa para penguasa untuk menandatangani perjanjian yang membuka banyak pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Pembatasan yang diberlakukan di bawah sistem Kanton dihapuskan. Opium, meski ada larangan kekaisaran, kini menjadi barang biasa. Saat opium membanjiri China, harganya turun, konsumsi lokal meningkat dengan cepat, dan obat tersebut menembus semua lapisan masyarakat. Di pelabuhan-pelabuhan perjanjian baru, pedagang asing berkolaborasi dengan beragam pedagang Cina yang lebih banyak daripada di bawah sistem Kanton, dan mereka berkelana jauh ke dalam interior Cina. Misionaris membawa ajaran Kristen kepada penduduk desa, dilindungi oleh hak diplomatik yang diperoleh berdasarkan perjanjian. Permusuhan yang populer pada orang asing baru mulai meningkat.

Tidak mengherankan, sejarawan China menganggap kedua Perang Opium sebagai pemaksaan kekuasaan asing yang tidak adil terhadap kerajaan Qing yang melemah. Pada abad ke-20, Republik China melakukan upaya keras untuk menghapus apa yang disebutnya "perjanjian yang tidak setara." Ini berhasil menghapus sebagian besar dari mereka dalam Perang Dunia II, namun fase imperialisme asing ini berakhir sepenuhnya dengan kembalinya Hong Kong ke Cina pada tahun 1997. Buku teks konvensional bahkan menandai dimulainya

sejarah Cina modern dari akhir Perang Opium pertama di tahun 1842 (Perdue, 2011).

Sebagai klimaks dari sengketa perdagangan antara Tiongkok dibawah Dinasti Qing dengan Inggris. Penyeludupan opium Inggris dari India ke Tiongkok dan usaha pemerintah Tiongkok menerapkan hukum obat-obatannya menyebabkan konflik militer. Inilah beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap munculnya perang Candu dan menjadi faktor Hong Kong menjadi daerah kolonial Inggris. Sehingga pada akhirnya Tiongkok kalah dalam berperang dan harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris sebagai salah satu wilayah kolonial.

Gambar 2.1
Pertumbuhan besar ekspor opium Inggris ke Tiongkok antara 1729



Sumber :

https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_essay01.html

Kapal layar cepat baru yang disebut kapal pemotong, dibangun dengan dek sempit, area layar besar, dan beberapa tiang, pertama kali muncul di Pasifik pada tahun 1830-an dan sangat merangsang perdagangan teh. Mereka membawa lebih sedikit muatan daripada Indomin Timur yang besar, tapi bisa membawa teh segar ke pasar Barat lebih cepat. Kapal-kapal *Clipper* juga terbukti sangat nyaman untuk menyelundupkan opium, dan secara terbuka dan populer diidentifikasi sebagai "Gunting Opium." Kapal seperti *Red*

Rover bisa membawa opium dengan cepat dari Calcutta ke Canton, menggandakan keuntungan pemilik mereka dengan melakukan dua pelayaran setahun.

Di Canton, larangan Qing telah memaksa para pedagang untuk menarik diri dari Macau dan Whampoa dan mundur ke pulau Lintin, di pintu masuk Sungai Pearl, di luar wilayah hukum pejabat setempat. Di sana para pedagang menerima kiriman opium dari India dan menyerahkan peti tersebut ke kapal-kapal kecil China dan perahu dayung yang disebut "Kepiting Cepat" dan "Naga yang Mengacak," untuk didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang pantai. Kapal penyelundup lokal yang kedua terkadang didorong oleh dua atau lebih dayung di setiap sisinya.

Gambar 2.2
Delta Sungai Mutiara



Sumber :

https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_essay01.html

Sumber India utama opium Inggris yang menuju ke China adalah Patna di Bengal, tempat obat tersebut diproses dan dimasukkan ke dalam peti berisi sekitar 140 kilogram. Aliran tahunan ke China sekitar 4.000 peti tahun 1790, dan sedikit lebih dari dua kali lipat pada awal 1820-an. Impor mulai meningkat pesat di tahun 1830-an, bagaimanapun, karena agitasi "perdagangan bebas" mendapat kekuatan di Inggris dan monopoli Perusahaan Hindia Timur mengenai perdagangan China mendekati tanggal penghentiannya (tahun 1834).

Perusahaan menjadi lebih bergantung dari pada pendapatan opium, sementara pedagang swasta segera meningkatkan kepemilikan mereka dalam perdagangan yang menguntungkan. Pada malam perang opium pertama, Inggris mengirimkan sekitar 40.000 peti ke China setiap tahunnya. Pada tanggal ini, diperkirakan ada sekitar sepuluh juta perokok opium di China, dua juta di antaranya pecandu. (Pedagang Amerika mengirim sekitar 10.000 peti antara 1800 sampai 1839) (Perdue, 2011).

i. Perang Candu I (1839-1842) dan Perjanjian Nanking

Perang Candu I sebagian besar berlangsung di pantai dan di laut. Pada perang tersebut kapal-kapal Inggris yang notabene lebih modern dari kapal-kapal Tiongkok, membombardir pantai tenggara Tiongkok. Pada awal perang ini ditandai dengan adanya penyerangan dari Inggris kepada Tiongkok, melihat dari bagaimana posisi awal Tiongkok yang sangat masih berada dalam perkembangan dan memulai kebangkitan dalam ekonomi namun dihadang oleh permasalahan ini.

Keunggulan persenjataan membuat armada Inggris dengan mudah menguasai kota-kota pelabuhan Xianggang (Hongkong), Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou dan Shanghai. Bahkan, pada bulan Agustus 1842, dengan kekuatan 80 kapal perang, mereka maju menuju Nanjing. Di tengah kondisi Tiongkok yang semakin terdesak. Kaisar Daoguang tidak menemukan jalan yang lebih baik selain menyerah kepada pihak Inggris. Pemerintah Tiongkok dipaksa menyetujui Perjanjian Nanjing, yang banyak merugikan mereka (Wicaksono, 2015).

Berikut point-point penting dari perjanjian Nanjing:

1. Tiongkok menyewakan Xianggang (Hongkong) pada Inggris.
2. Pelabuhan-pelabuhan Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai harus dibuka bagi perdagangan dengan pihak Inggris.
3. Tiongkok diwajibkan membayar kerugian perang sebesar 21 juta mata uang perak.
4. Memberikan hak istimewa bagi Inggris, serta membuka daerah khusus (ekstrateritorial) sebagai tempat tinggal warga Inggris.
5. Hubungan antara pejabat-pejabat Tiongkok dan Inggris harus berdasarkan asas sama rata.
6. Inggris berhak mengangkat konsul di tiap-tiap pelabuhan yang dibuka bagi aktivitas perdagangan mereka (Wicaksono, 2015).

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1842, sama sekali tidak menyelesaikan masalah penyelundupan candu. Penyelundupan masih berlangsung, meskipun secara resmi tetap dilarang. Setelah perjanjian Nanjing tercetus, Amerika Serikat juga menuntut hak yang sama dengan Inggris. Amerika mengirimkan utusan bernama Caleb Cushing untuk merundingkan hal itu dengan pemerintah Tiongkok. Usaha Cushing berhasil, Tiongkok dan Amerika menyepakati perjanjian bilateral pada tahun 1844. Perjanjian tersebut membuat Amerika mendapatkan pula seluruh hak istimewa yang didapatkan Inggris (Jacques, 2011).

Di dalam perjanjian bilateral ini, hakim-hakim Tiongkok tidak memiliki wewenang untuk mengadili warga Amerika yang melakukan pelanggaran hukum dan harus menyerahkannya pada pengadilan konsulat Amerika. Selain Amerika, Prancis juga menyusul mendakan perjanjian bilateral dengan Tiongkok pada tahun yang sama guna memperoleh hak-hak istimewa. Sebagai hasilnya, Tiongkok mengizinkan penyebaran agama Katolik dan mengembalikan hak milik gereja yang telah dilarang seabad sebelumnya (Ruck, 2008).

ii. Perang Candu II (1856-1860 M)

Perang Candu II dapat dianggap sebagai kelanjutan dari ambisi imperialisme Eropa di Tiongkok. Pihak Eropa yang telah mendapatkan hak-hak dagang khusus di Tiongkok, masih berambisi untuk memperluas kekuasaannya. Pihak Inggris ingin memperkuat pengaruhnya di Tiongkok dengan memaksa Dinasti Qing memperluas wilayah perjanjian Nanjing. Pada tahun 1854, mereka menuntut seluruh Tiongkok dijadikan wilayah dagang terbuka bagi East India Company, perdagangan candu dilegalkan, dan diperbolehkannya duta besar Inggris ditempatkan di Beijing (William Travis Hanes, 2002).

Tuntutan serupa juga datang dari Amerika Serikat dan Prancis. Akan tetapi, pemerintah Dinasti Qing menolak semua tuntutan tersebut, sehingga hubungan Tiongkok dan Barat menjadi memanas. Meskipun demikian, Perang Candu II secara khusus dipicu oleh tindakan pejabat Dinasti Qing yang menghentikan kapal bernama Arrow, kapal Tiongkok yang telah diregistrasi di Hongkong (kapal tersebut dikapteni orang Inggris dan seluruh awaknya merupakan warga Tiongkok). Telah menjadi kebiasaan, jika kapal Tiongkok hendak menyelundupkan sesuatu, mereka meregistrasikan terlebih dulu kapalnya di Hongkong, sehingga dapat berlayar di bawah bendera Inggris dan terhindar dari jeratan hukum Tiongkok (Beeching, 1975).

Pada tanggal 8 Oktober 1856 kapal tersebut berlabuh di Kanton. Pada pagi harinya, mereka dihentikan oleh 4 pejabat dan 60 pasukan bersenjata. Mereka mencurigai Arrow hendak menyelundupkan sesuatu ke wilayah Tiongkok. Kapten kapal mendatangi konsulat Inggris untuk melaporkan penahanan yang dilakukan pejabat Tiongkok. Konsul Inggris, Harry Parkes, segera meresponnya dengan mendatangi pejabat Tiongkok yang melakukan penahanan serta memprotes tindakan mereka. Meskipun telah diprotes, 12 orang di antara awak kapal itu tetap ditahan karena dianggap melakukan tindak kriminal penyelundupan. Pihak Inggris ngotot, bahwa kapal itu telah diregistrasi di Hongkong, oleh karena itu hukum khusus berlaku terhadap mereka, dan meminta agar kapal dan awaknya dibebaskan.

Pihak Tiongkok menolak permintaan Parker, karena gagal membebaskan para awak Konsul Inggris kembali ke kantornya dan menyurati Gubernur Ye Mingchen. Ia membuat tuduhan bahwa para pejabat Tiongkok telah menghina bendera Inggris. Selain itu, ia juga menuduh pihak Tiongkok telah melanggar perjanjian ekstrateritorial dengan Inggris. Parker juga mengirimkan surat kepada Gubernur Sir John Bowring dan Admiral Sir Michael Seymour di Hongkong, meminta Inggris menuntut permintaan maaf Tiongkok. Mungkin Parker melihat peristiwa ini sebagai salah satu kesempatan untuk memperluas imperialisme Inggris di Tiongkok.

Dari hasil penyelidikan pejabat Tiongkok yang berwenang mendapati bahwa sembilan di antara dua belas orang yang ditangkap tidak bersalah. Gubernur Ye dengan tenang dan sopan menjawab tuntutan sepihak Inggris. Dijelaskannya alasan penangkapan serta penyesalan terhadap kesalah-pahaman yang terjadi. Ia juga mengatakan tidak ada sedikit pun keinginan untuk menghina bendera Inggris. Gubernur Ye lalu menawarkan untuk menyerahkan 12 orang yang di tahan itu pada tanggal 12 Oktober 1856.

Akan tetapi, Parker menolak tawaran tersebut meskipun pihak Tiongkok telah menyampaikan rasa penyesalan. Ia tetap bersikeras agar Gubernur Ye mengeluarkan permintaan maaf secara tertulis serta pembebasan awak kapal yang tidak bersalah dengan segera. Ye merespon kesombongan pihak Inggris dengan menyatakan bahwa hukum ekstrateritorial hanya berlaku bagi kapal Inggris, sedangkan Arrow adalah kapal Tiongkok. Ia juga mempertanyakan kewenangan pihak Inggris untuk ikut campur urusan penangkapan warga negara Tiongkok oleh pejabat berwenangan Tiongkok, apalagi saat itu kapal

juga berada di perairan Tiongkok. Gubernur menyimpulkan insiden tersebut bukan lah merupakan pelanggaran perjanjian apa pun.

Pihak Inggris menolak penjelasan pihak Tiongkok di aas, meskipun bukti-bukti dan saksi menguatkan pembelaan Ye. Mereka tetap ngotot bahwa kapal itu tetap kapal Inggris dan warga negara mana pun yang berada di atas kapal Inggris berada di bawah naungan hukum Inggris.

Polemik ini terus berlanjut hingga tanggal 21 Oktober 1856, di mana sekali lagi Parker menuntut permintaan maaf Tiongkok. Keesokan harinya, Gubernur Ye mengirim para tahanan itu ke konsulat Inggris, termasuk yang terbukti bersalah melakukan penyelundupan, namun pihak Inggris menanggapi dingin usaha tersebut. Gubernur Ye tetap bersikeras tidak perlu mengeluarkan permintaan maaf, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Setelah Tiongkok tidak kunjung meminta maaf, arogansi Inggris pun semakin menjadi. Mereka mengerahkan angkatan perangnya pada tahun 1857 untuk menggempur Kanton. Prancis ikut bergabung dengan Inggris setelah hukuman mati yang dijatuhkan terhadap seorang misionaris Prancis bernama August Chapdelaine.

Kanton berhasil dirbeut dan mereka bergerak menuju Beijing. Sementara itu, Kaisar Xianfeng (1851-1860) yang ketakutan melarikan diri ke Jehol. Perang Candu II baru berakhir setelah pihak Tiongkok bersedia menandatangani Perjanjian Tianjin pada bulan Juni 1858. Berikut isi dari perjanjian Tianjin:

1. Inggris, Prancis, Amerika, dan Rusia diizinkan membuka kedutaan di Beijing, yang saat itu merupakan kota tertutup bagi orang asing.
2. Sepuluh pelabuhan baru dibuka bagi bangsa Barat, termasuk Danshui, Hankou, Niuzhuang, dan Nanjing.
3. Pemberian izin kunjungan orang asing ke pedalaman Tiongkok, baik untuk urusan dagang atau kegiatan misionaris.
4. Tiongkok harus membayar kerugian perang sebesar 4 juta tail perak pada Inggris dan 2 jut apada Prancis.
5. Pelarangan menyebut bangsa Barat sebagai *yi* (barbar).

Walaupun perjanjian telah ditandatangani, kerajaan tetap tidak mengizinkan pendirian kedutaan di Beijing. Oleh karena itu, pada tahun 1860, kekuatan gabungan Inggris dan Prancis kembali melancarkan serangan, dan berhasil menaklukan Beijing pada tanggal 6 Oktober 1860. Kaisar Xiangfeng kembali melarikan diri ke istananya di Chengde, di mana sebelumnya ia telah memerintahkan Pangerang Gong untuk bernegosiasi dengan bangsa Barat.

Di saat yang bersamaan, bangsa Barat membakar istana kekaisaran dan menjarahnya. Untuk meredam kekejaman bangsa Barat, pangerang Gong menyampaikan kembali kesediaan Dinasti Qing untuk menjalankan seluruh isi perjanjian Tianjin dalam wujud Konvensi Beijing yang diratifikasi pada tanggal 18 Oktober 1860. Adapun isi dari ratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tiongkok mengakui kembali Perjanjian Tianjin.
2. Menjadikan Tianjin sebagai pelabuhan terbuka.
3. Kerugian yang harus diganti Tiongkok kepada Inggris dan Prancis ditingkatkan menjadi 8 juta nail perak.
4. Perdagangan candu dilegalkan.

Dengan keluarnya ratifikasi ini sekaligus mengakhiri sepenuhnya Perang Candu dan menjadikan candu sebagai barang yang legal di dataran Tiongkok.

Sejarah adanya perang Candu ini menjadi awal mula perebutan daerah Hong Kong oleh negara Inggris dan adanya peminjaman wilayah yang termasuk dampak dari perang Candu. Ketika Hong Kong telah direbut oleh Inggris sebagai wilayah kolonialnya, adanya perubahan beberapa sistem dan pemerintahan di Hong Kong. Atas kemenangan Inggris pada perang Candu berarti telah memulai imperialisme di Tiongkok dengan menduduki Hongkong. Hongkong oleh Inggris dijadikan pangkalan militer dan pelabuhan perdagangan. Hongkong merupakan tempat yang strategis karena terletak di muara sungai Yang Tze yang merupakan pintu utama masuk ke Tiongkok. Pada pertengahan abad ke- 19 merupakan puncak kemakmuran dan kemegahan bagi Inggris. Sebagai Negara industri dan Negara penjajah terbesar di dunia pada saat itu, Inggris menduduki tempat istimewa dalam percaturan politik ekonomi internasional.

Pada tahun 1842 Hong Kong dijadikan pangkalan militer Inggris, dikarenakan merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis di Asia. Ketika era penjajahan Inggris, Hong Kong dikepalai oleh seorang guburnur yang merupakan pilihan ratu Inggris bernama Henry Pottinger dengan letak ibu kota di wilayah Victoria dan berstatus sebagai daerah kolonial Inggris. Pada masa kolonialnya, Inggris mencoba merubah kebijakan dan sistem ekonomi yang dimiliki oleh Hong Kong, sehingga Hong Kong lebih berkembang dan ekonominya semakin maju. Sebelum menjadi daerah kolonial Inggris, Hong Kong merupakan salah satu desa nelayan yang dikuasai oleh bajak laut pantai Tiongkok selatan (Hong Kong Government, 2016).

Hong Kong pada masa Dinasti Ming merupakan salah satu pusat perdagangan dan sangat banyak imigran dari negara Tiongkok yang datang untuk menetap di wilayah Hong Kong tersebut. Pada tahun 1860 Inggris mendapatkan wilayah tambahan sebagai koloni, yaitu semenanjung Kowloon, dan New Territories beserta 230 pulau didapat pada tahun 1898 dengan masa sewa 99 tahun.

Kolonialisme Inggris bersifat realis dimana Inggris melarang masyarakat Hong Kong dan Tiongkok untuk menetap di puncak Victoria yang memiliki pemandangan yang indah, dengan demikian Inggris menjadikan Victoria ini menjadi salah satu tempat villa mewah untuk pemukiman penjajah Inggris. Kedatangan imigran dari wilayah Tiongkok mendukung kemajuan Hong Kong sebagai pelabuhan perdagangan dan pusat industri. Perkembangan Ekonomi Hongkong tidak lepas dari kebijakn yang diterapkan oleh Inggris sebagai Negara Induknya, pendekatan *laissez fiare* (biarkan rakyat bertindak sendiri) telah menjadikan Hongkong sebagai kota pelabuhan yang maju.

Perjalanan Hong Kong berada dalam masa kolonial Inggris tidak terlepas dari konflik yang berhubungan dengan masyarakat Hong Kong, pada tahun 1966 terjadi pemberontakan anti kolonial setelah adanya bentrok antara penduduk Tiongkok dengan polisi tentang karcis dipelabuhan fery yang semakin naik. Pada tahun 1966 sampai 1968 adanya penyebaran revolusi kebudayaan juga menyebabkan kerusuhan di Hong Kong dan telah memakan korban jiwa. Tata hukum yang berlaku di Hong Kong sama dengan tata hukum Inggris, perkembangan Hong Kong selain bidang ekonomi yaitu dalam bidang politik yang ditandai dengan adanya pemilu pertama pada tahun 1991 dan pemilu kedua pada tahun 1995 dan pada saat itu Partai Demokarasi menjadi partai yang terbesar di Hong Kong.

Tabel 2.1
Perubahan Ekonomi Hong Kong Tahun 1979 dan 1995

	1979	1995
GDP (US \$ Biliar)	18.2	142.5
GDP Perkapita (US\$)	3,590	23,019
GDP Sektor (Persen)		
Industri	32.0	16.8
Manufaktur	23.8	9.3
Pertanian	0.8	0.2
Servis	67.2	83.0

Perdagangan luar negeri (Persen)		
Ekspor	8.3	33.3
Impor	17.6	36.1
Luar Pengelolaan	0.0	82.0
Pekerjaan menurut sektor (Persen)	44.0	15.0
Industri	34.0	60.0
Servis		
Perusahaan menurut sektor (Persen)	32.0	11.0
Industri	68.0	89.0
Servis		
Investasi (US \$ Biliar)		
Hong Kong di Tiongkok	1.0	66.0
Tiongkok di Hong Kong	N.A.	42.0
Travel (Miliar)		
Pengunjung dari Tiongkok	0.1	2.1
Pendatang ke Tiongkok	3.0	26.4

Sumber : Cheng, J. Y. (1997). *The Other Hong Kong Report 1997*.

Hong Kong

Dilihat dari tabel diatas bahwasanya banyak sektor-sektor yang mengalami kemajuan di wilayah Hong Kong, perubahan ini dilihat pada era kolonial Inggris, bahwasanya dengan adanya pergantian sistem dan konsep yang disusun oleh Inggris dalam menjadikan Hong Kong sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Peningkatan itu bukan hanya dikarenakan oleh bagaimana sistem yang dijalankan namun tetap ada campurtangan dari negara penjajah yaitu Inggris (Cheng J. Y., 1997).

2. Ekonomi Hong Kong Pada Masa Hak Kembali Kepada Tiongkok

Setelah melalui era kolonial yang dinyatakan dengan pengembalian Hong Kong kepada negara Tiongkok oleh Inggris, terdapat berbagai perjanjian dan persetujuan yang dibuat oleh ketika pihak ini (Fok, 2006). Pada 1 Juli 1997, dalam sebuah upacara yang dihadiri Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Pangeran Charles dari Wales, Presiden Tiongkok; Jiang Zemin, dan Sekretaris Negara Bagian; Madeleine Albright secara resmi Hong Kong kembali ke pangkuan Negeri Tirai Bambu. Perayaan penyatuan Hong Kong ke Tiongkok dilakukan dengan damai meski sebagian warga Hong Kong saat itu memprotes keputusan tersebut.

Deklarasi bersama Inggris ditandatangani pada akhir 1984, membuka jalan bagi Hong Kong dibawah kendali Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997, dibawah kebijakan “satu negara, dua sistem”. Disepakati bahwa Hong Kong akan menjadi wilayah administratif khusus di negara Tiongkok, dengan perjanjian Hong Kong akan tetap dengan sistem dan jalannya selama 50 tahun (Philip R. Cateora, 2007). Pada tanggal 30 Juni 1997 merupakan hari terakhir pemerintahan Inggris di Hong Kong, sebuah upacara penyerahan berlangsung di Pusat Konvensi dan Pameran Hong Kong yang baru dibangun di Wan Chai..

Serah terima resmi dimulai dengan sebuah pidato perpisahan yang dibacakan oleh Pangeran Charles atas nama Ratu Elizabeth II. Beberapa menit sebelum tengah malam, bendera nasional Inggris dan bendera kolonial Hong Kong diturunkan saat lagu kebangsaan Inggris dimainkan, secara resmi mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris di kota yang berpenduduk hampir 6,5 juta orang.

Setelah adanya penurunan bendera Inggris dilanjutkan dengan pengibaran bendera nasional Tiongkok dan bendera Hong Kong SAR yang baru diangkat ke lagu kebangsaan Tiongkok. Pertunjukan kembang api diluncurkan di Lapangan Tiananmen di Beijing dimana orang berkumpul untuk menyaksikan upacara tersebut. Perwakilan resmi serah terima untuk Inggris termasuk: Pangeran Charles, perdana menteri Tony Blair, sekretaris luar negeri Robin Cook, gubernur Hong Kong Chris Patten, dan kepala staf pertahanan Sir Charles Guthrie (South China Morning Post, 2016).

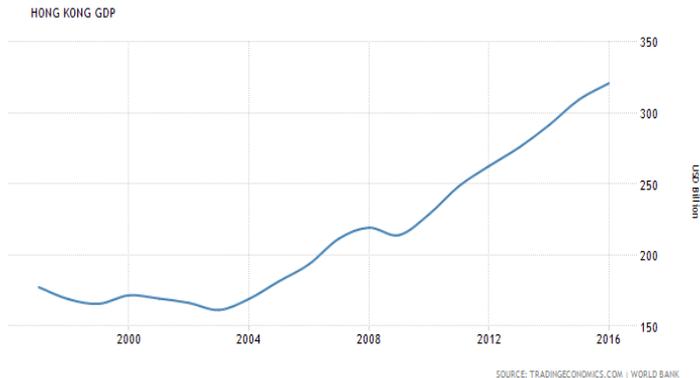
Pada era kolonial, Hong Kong sudah memiliki banyak kemajuan dalam berbagai bidang ekonomi maupun politik. Dapat dilihat dari berbagai pencapaian yang sudah diraih oleh Hong Kong dan bentuk dari pergerakan ekonominya yang mampu menjadikan Hong Kong sebagai pusat perekonomian Asia. Setelah era kolonial, Hong Kong mendapatkan kebijakan khusus dari negara Tiongkok yaitu *One Country Two System* dimana Hong Kong memiliki kebebasan dalam menjalankan sistem yang ada di wilayahnya sesuai dengan sistem yang sudah diterapkan oleh Inggris pada era kolonial. Hong Kong dengan menjadi wilayah administratif khusus di Tiongkok dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cepat dan kemajuannya dalam berbagai sektor.

Kemajuan ekonomi Hong Kong paska kolonial menjadi salah satu gambaran baru di kawasan Asia, dengan sistem yang berbeda dengan negara Tiongkok menjadikan Hong Kong lebih leluasa dalam mengembangkan wilayahnya baik dalam pendapatan perkapita,

penyediaan jasa, penanaman saham dan kerjasama dengan negara-negara lain. Sangat banyak betuk dorongan yang diberikan oleh Inggris ketika era kolonial yang memberikan banyak dampak dalam perkembangan ekonomi dan politik Hong Kong. Hong Kong dengan ukuran wilayah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Tiongkok akan tetapi mampu mengambil simpati banyak negara dalam penyediaan tempat investasi dan pasar.

Hong Kong memiliki peningkatan yang sangat drastis , *Hong Kong's Gini coefficient* telah naik ke rekor tertinggi, dari 0,518 di tahun 1996 menjadi 0,539 pada tahun 2016. Demikian juga, harga perumahan telah menjadi sangat tidak terjangkau, dengan harga rumah rata-rata adalah 18 kali pendapatan rumah tangga rata-rata, menjadikan Hong Kong sebagai wilayah dengan rasio tertinggi di dunia. Dapat dilihat peningkatan GDP Hong Kong dari diagram dibawah ini:

Tabel 2.2
Perkembangan GDP Hong Kong



Sumber : TRADINGECONOMICS.COM | WORLD BANK

Menurut diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Hong Kong mengalami peningkatan yang sanagt signifikan setiap tahunnya walaupun masih ada penurunan. Diagram yang dilansir oleh *World Bank* ini menyatakan GDP hong Kong mampu mencapai level yang tinggi, sedangkan negara Tiongkok masih berada dibawah.

B. Pentingnya Peran Hong Kong Dalam Pembangunan Ekonomi Tiongkok

Hong Kong adalah salah satu wilayah yang sangat maju di negara Tiongkok, bukan hanya Hong Kong namun ada beberapa wilayah lain seperti Macau, Shanghai, Guangzhou, Beijing dan lainnya yang juga sangat maju serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian Tiongkok secara keseluruhan. Kemajuan perekonomian Hong Kong berdampak sangat baik kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok baik dari segi sektor-sektor unggulan, pasar, investasi, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Kemajuan perekonomian Hong Kong menggunakan sistem yang berbeda dengan Tiongkok mampu memberikan dampak yang lebih terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok dibandingkan dengan era sebelum bergabungnya Hong Kong dengan Tiongkok.

Beberapa hal yang menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagian penting di Tiongkok yaitu Hong Kong menganut sistem perdagangan bebas, dengan menjadikan dirinya sebagai pusat keuangan internasional, 90% perekonomian Hong Kong ditopang oleh sektor jasa. Selain itu ekspor dan impor Hong Kong juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Dalam perkembangannya perekonomian Hong Kong semakin berkorelasi dengan sektor eksternal Daratan Tiongkok, meskipun secara keseluruhan tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang-bidang lain. Integrasi Hong Kong dengan daratan Tiongkok akan semakin mempererat hubungan dengan semakin luasnya akses yang dibuka oleh WTO (*World Trade Organization*). Dalam beberapa tahun ke depan, Hong Kong akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya perdagangan Antara Daratan Tiongkok dan Negara-negara lainnya. Ekspor yang dilakukan oleh Tiongkok masih menjadi penyumbang kecil di dunia, akan tetapi pada tahun 2020 diharapkan Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 10% (Wong, 2002). Hal ini menjadi peran yang sangat penting bagi Hong Kong untuk memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Tiongkok melalui sektor-sektor yang telah dibangun oleh Hongkong.

Tabel 2.3
Saham Global Ekspor Terpilih dalam Presentase, 2020

Negara	Presentase (%)
Tiongkok	4.0
Japan	7.7

Asia NIEs*	7.7
France	5.2
Germany	8.8
United Kingdom	4.5
United State	12.4

Sumber : IMF, Direction of state statistics

(*) : Korea, Singapore, Taiwan, Hongkong

Investor terbesar di Tiongkok FIE (*Foreign-Invested Enterprises*) berasal dari Hong Kong. Dewan Pembangunan Perdagangan Hong Kong memperkirakan bahwa pada akhir bulan April 1999, ada 180.653 Proyek investasi yang didanai Hong Kong di Tiongkok, mewakili hampir 55 persen dari semua proyek investasi asing di negara ini. Sebagian besar proyek berada di manufaktur untuk ekspor. Jumlah investasi masing - masing relatif kecil. Investasi pada proyek impor / ekspor adalah juga terkait erat dengan produksi. Bagian terbesar investasi dilakukan di Provinsi Guangdong. Pada tahun 2001, Guangdong menerima FDI (*Foreign Direct Investment*) sebesar US \$ 15,7 miliar. Investasi dari Hong Kong telah menyumbang 60 persen dari semua total pada tahun 2001. Di tahun-tahun sebelumnya, Hong Kong berkontribusi bahkan lebih tinggi yaitu 70 persen sampai 80 persen. Proporsi sekarang lebih rendah karena ekonomi Guangdong telah menjadi lebih besar dan lebih banyak dana dari bagian lain dunia yang mengalir pada tingkat yang lebih cepat. Apa yang ditunjukkan oleh angka kebiasaan Tiongkok adalah bahwa FIEs merupakan bagian yang paling signifikan perkembangannya dalam produksi industri ringan di Tiongkok.

Investasi Manufaktur Hong Kong di Kawasan Delta Sungai Mutiara melakukan survey terhadap 123.000 perusahaan manufaktur dan perusahaan yang berbasis ekspor-impor di Indonesia. Hong Kong melakukannya pada bulan April 2002, dan menemukan sekitar 63.000 perusahaan (atau 53 persen) memiliki operasi manufaktur di daratan Tiongkok. 123.000 perusahaan melibatkan 477.000 pekerja di Hong Kong, 63.000 perusahaan dengan operasi manufaktur di Daratan mempekerjakan 389.000 pekerja di Hong Kong. Diperkirakan 22 persen (atau 27.000 perusahaan) manufaktur dan perusahaan ekspor impor telah berinvestasi di fasilitas pabrik di Daratan, 26 persen (atau 32.000) memiliki pengelolaan dan pengendalian operasi fasilitas pabrik, dan 23 persen (atau 28.000) telah membuat pengaturan pemrosesan subkontrak dengan pabrik di Daratan.

Tabel 2.4
Perkiraan Jumlah Perusahaan dengan Kegiatan di Tiongkok Daratan

	Fasilitas pabrik yang telah mapan		Membuat pengaturan pemrosesan subkontrak dengan perusahaan investasi asing dan lokal	Memiliki beberapa kegiatan ekonomi di Tiongkok daratan	Tidak memiliki aktivitas ekonomi di Tiongkok daratan
	Diinvestasikan di fasilitas pabrik	Memiliki manajemen dan pengendalian operasi fasilitas pabrik			
Semua Perusahaan	27.000	32.000	28.000	63.000	60.000
Manufaktur	3.000	3.000	3.000	7.000	13.000
Ekspor-Import	24.000	29.000	25.000	56.000	47.000

Sumber : Wong, Y.-C. R. (2002). *The Role of Hong Kong in China's Economic Development*. Hongkong: University of Hongkong.

Hong Kong memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Tiongkok. Setelah kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, Tiongkok memiliki kemajuan yang cukup pesat dalam perekonomiannya. Hong Kong merupakan pintu kemajuan dan tempat penyaluran barang terpenting bagi Tiongkok, Hong Kong juga menjadi sumber investasi terbesar di daratan Tiongkok, dan Hong Kong adalah sebagai pusat penggalangan modal pantai lepas utama untuk perusahaan Tiongkok. Kemudian sebaliknya Tiongkok juga merupakan sumber investasi eksternal terbesar bagi Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council, 2018). Inilah yang menjadi peran penting Hong Kong dalam pembangunan ekonomi Tiongkok, sehingga kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok merupakan salah satu pintu untuk kemajuan ekonomi serta Tiongkok juga mampu menjadi pemeran penting ekonomi di dunia, walaupun harus menjadikan Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus.